

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan sektor publik Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* serta ketepatanwaktuan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatanyang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2009).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

memenuhi kriteria karakteristik kualitatif, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang relevan apabila terdapat (1) manfaat umpan balik (*feedbackvalue*), (2) manfaat prediktif (*predictitive value*), (3) tepat waktu (*timeliness*), dan (4) lengkap.

Berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, ketepatan waktu merupakan nilai informasi yang penting yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan berbagai pihak. Ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Ketepatan waktu merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedianya informasi ditangan pemakai atau pengguna. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatan waktu informasi akuntansi menurut SFAC No. 2 mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Ketepatan waktu laporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Pemerintah Daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi merupakan faktor pendukung bagi pegawai untuk mempermudah dalam pekerjaannya agar dapat terwujud laporan pertanggungjawaban keuangan yang memiliki ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan serta dapat diandalkan. Menurut Indriasari (2008) menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memanfaatkan dan kemajuan teknologi informasi akan dapat meningkatkan nilai informasi pada laporan keuangan daerah sehingga penyampaian dapat tepat waktu dan dapat diandalkan.

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Hal kedua yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Menurut Yosa (2010) dalam Arfianti (2010:29) yang dimaksud pengawasan keuangan daerah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar

pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik.

Adapun fenomena yang terjadi di beberapa Organisasi perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Rokan hulu ditemukan keterlambatan dalam menyampaikan laporannya. dari latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah)”**

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Signifikan Secara Parsial Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hulu ?
- b. Apakah Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan Secara Parsial Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hulu ?

- c. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan Secara Simultan Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Signifikan Secara Parsial Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hulu .
- b. Untuk Mengetahui Apakah Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan Secara Parsial Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hulu
- c. Untuk Mengetahui Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan Secara Simultan Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hulu

1.4. Manfaat penelitian

- a. Bagi Peneliti
Sebagai bahan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh serta menjadi pembandingan untuk membandingkan teori dan fakta.
- b. Bagi Peneliti selanjutnya
Untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya tentang bagaimana pengungkapan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan

pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak OPD, yaitu sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah.

1.5. Batasan Masalah dan originalitas

1.5.1. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan mengingat bahwa luasnya masalah yang akan diteliti maka peneliti membatasi masalah pada pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah Pada OPD Kabupaten Rokan Hulu (Studi Empiris OPD pada kabupaten Rokan Hulu yang ada di komplek perkantoran pemda Kabupaten Rokan Hulu)

1.5.2. Originilitas

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Andry Trisaputra, Universitas Negeri Padang tahun 2013 yang berjudul PengaruhPemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan

keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan orisinalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan penelitian yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, variabel penelitian, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh beserta pembahasannya sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Menurut Catrinasari (2006) dalam Trisaputra (2013) Ketepatanwaktuan (timeliness) adalah informasi yang ada siap untuk digunakan sebelum kehilangan makna oleh pemakai laporan keuangan serta kapasitasnya masih tersedia dalam pengambilan keputusan.

Ketepatanwaktuan merupakan salah satu dalam karakteristik nilai informasi yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan dalam pembuatan laporan keuangan (Suwardjono, 2014) dalam Asnsori (2018). Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu merupakan hal yang paling penting dalam pemerintahan. Apabila informasi tersedia dalam waktu yang lama, maka informasi tersebut tidak mempunyai nilai lagi dikarenakan ketepatanwaktuan itu informasi tersedia tepat waktu bagi pengambilan keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil.

Ketepatan waktu berkaitan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Informasi yang bernilai prediktif dan balikan dapat menjadi tidak relevan bila tidak tersedia ketika dibutuhkan. Ketepatan waktu informasi mengandung arti bahwasanya informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam proses pengambilan keputusan (Suwardjono, 2014).

Ketepatan waktu laporan keuangan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dikarenakan ketepatan waktu menunjukkan bahwa informasi yang diberikan bersifat baru dan informasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tersebut dikategorikan baik. Relevannya suatu laporan keuangan dapat diperoleh bila laporan keuangan tersebut dapat disajikan tepat waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu merupakan hal penting dalam publikasi laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tepat waktu merupakan tersedianya suatu informasi pada saat akan dilakukannya pengambilan sebuah keputusan. Laporan keuangan berasal dari berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh manusia didalam sebuah organisasi. Dan, manusia pula yang memiliki kecerdasan pemikiran untuk dapat menyusun segala bentuk transaksi tersebut di dalam sebuah laporan keuangan dengan tujuan agar laporan keuangan tersebut dapat memiliki manfaat bagi khalayak yang membutuhkannya. Untuk dapat memenuhi kebermanfaatannya dari laporan keuangan tersebut, tepat waktu merupakan hal yang harus diperhatikan bagi penyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tidak akan berguna lagi jika ketika dibutuhkan dalam sebuah pengambilan keputusan, laporan keuangan tersebut tidak tersedia atau bahkan penyusunannya belum selesai dilakukan

Publikasi informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin guna memastikan tersedianya informasi yang aktual bagi pengguna informasi. Ketepatan waktu memperlihatkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada interval tertentu untuk mempengaruhi prediksi dan keputusan para

pengguna informasi. Jika informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu, hal tersebut akan menyebabkan informasi kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas keputusan (Arfianti, 2012). Rachmawati (2008) mendefinisikan informasi sebagai bukti yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan individual. Akan tetapi, informasi baru akan bermanfaat bagi penggunanya bila informasi tersebut tepat waktu.

Harahap (2011) menyatakan bahwa untuk menyampaikan informasi yang tepat waktu kerap kali perusahaan melaporkan seluruh transaksi ataupun peristiwa yang belum diketahui sehingga mengakibatkan informasi tersebut kehilangan keandalannya. Apabila pelaporan ditunda hingga seluruh aspek diketahui, maka informasi yang dihasilkan mungkin andal akan tetapi manfaatnya akan berkurang bagi pengambilan keputusan. Sehingga perusahaan harus mengupayakan keseimbangan antara manfaat dari ketepatan waktu pelaporan keuangan dan keandalan informasi yang tersedia.

Vidiasari (2012) mendefinisikan kepatwaktuan dalam dua cara;

1. ketepatwaktuan didefinisikan sebagai keterlambatan pelaporan keuangan dari tanggal laporan sampai dengan tanggal melaporkan.
2. ketepatwaktuan ditentukan dengan waktu relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan.

2.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi yang menggunakan perangkat komputer. Perangkat komputer tersebut berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras dan perangkat lunak

saling berkaitan yang berguna untuk meningkatkan penyaluran informasi agar menjadi lebih efektif dan berkualitas (Dita Kurniawati, 2017)

Menurut Sukirman (2013) dalam Puspaningsih (2016) Teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh staf bagian akuntansi/keuangan untuk mempercepat proses pengelolaan dan penyampaian laporan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya

- a. Pengolahan data, pengolahan informasi, system manajemen dan proses kerja secara elektronik
- b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Husna (2017) berpendapat bahwa pemanfaatan informasi dapat diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Untuk mengolah data secara manual biasanya berlaku semakin cepat waktu yang digunakan maka semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan. Dengan diperbantukan komputer pengolahan data dapat diatur sedemikian rupa sehingga informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan biaya yang masih dibawah manfaat yang diperoleh. Semakin maju teknologi informasi, semakin banyak pengaruhnya pada bidang akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi oleh para pemakai makin memudahkan dalam melakukan pekerjaannya, seperti mengubah data akuntansi menjadi informasi atau untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan audit yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era reformasi berdampak signifikan pada sistem informasi akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dampak yang dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer.

Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Wahana Komputer, 2003). Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi

Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian system informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011):

1. Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
2. Keakurasian dalam perhitungan dan perbandingan lebih besar,
3. Kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,
4. Penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu,
5. Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,
6. Pilihan pemasukan data dan penyediaan *output* lebih luas/banyak, dan
7. Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

Sedangkan kelemahannya, system komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan system terkomputerisasi memakan waktu lebih lama,

biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, dan komputer peka terhadap pengaruh lingkungan.

2.3. Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2019, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari pengertian keuangan negara tersebut di atas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara dimana “negara” dianalogikan dengan “daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah.

Menurut Arfianti (2011) dalam Ansori (2018) yang dimaksud dengan pengawasan keuangan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data

organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

a. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut:

- a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
- b. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi Negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
- c. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara/daerah yang akan membebankan dan merugikan negara/daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

d. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

2.2. Hasil Penelitian yang relevan

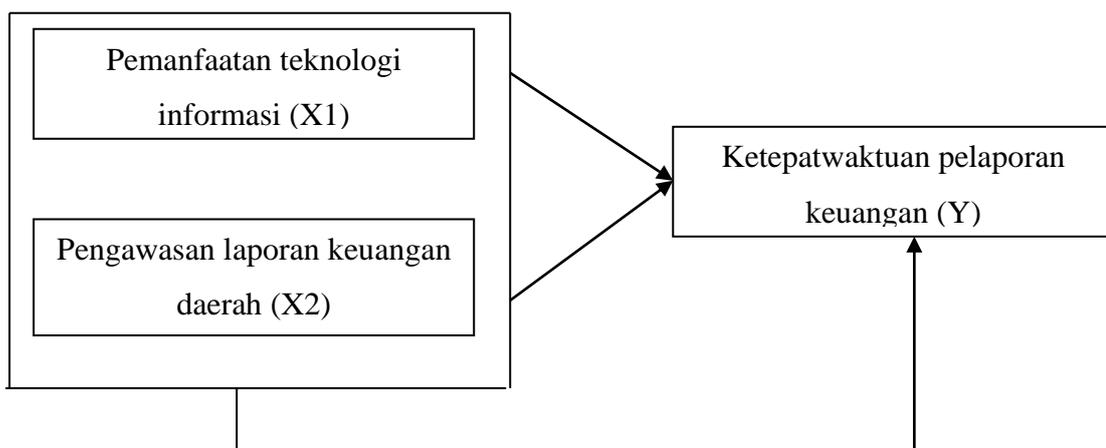
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andry Trisaputra	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)	- Independen : pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah - Devenden : ketepatanwaktuan pelaporan keuangan	pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2	Muhammad Azis Anshori	Pengaruh Pengawasan	- Independen : pengawasan	pengawasan keuangan daerah

	(2018)	Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah <i>(Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Bantul)</i>	keuangan daerah, sumber daya manusia, pemanfatan teknologi informasi - Devenden : ketepatanwaktuan pelaporan keuangan	dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3	Kadek Pande Astrawan, Made Arie Wahyuni, Nyoman Trisna Herawati	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Dan Pengawasan	- Indevenden : sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsialdan simultan sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia,

(2016)	Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Buleleng	pengendalian intern, pengawasan keuangan pemerintah daerah - Devenden : ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah	pengendalian intern, dan pengawasan pelaporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
--------	---	--	---

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran menjelaskan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terlihat sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skematis Kerangka Pemikiran

2.4. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dalam penelitian dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 = Diduga Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Signifikan Secara Parsial Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hulu

H2 = Diduga Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten rokan hulu.

H3 = Diduga Pemanfaatan teknologi informasi dan Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten rokan hulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Tabel 1.1
OPD Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Dinas, Badan dan Kantor
1	Sekretariat Daerah
2	Inspektorat
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4	Dinas Kesehatan
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
9	Dinas Perternakan dan Perkebunan
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Dinas Lingkungan Hidup
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
22	Badan Pendapatan Daerah
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : Sekretariat Daerah

3.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan serta memperlihatkan pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan sebagai variabel independen dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah sebagai variabel dependennya.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2017:80) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat memberikan informasi atau data yang berguna bagi suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

3.3.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *judgement sampling*. *Judgement sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Dimana

yang menjadi sampel dalam penelitaian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Komplek Perkantoran pemda Kabupaten Rokan Hulu. Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan staf akuntansi pada masing-masing OPD. Masing - masing Organisasi Perangkat Daerah akan diberikan 3 (tiga) kuesioner, sehingga total subjek penelitian yang akan diberikan kuesioner sebanyak 72 responden.

Tabel 1.2
OPD Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Dinas, Badan dan Kantor
1	Sekretariat Daerah
2	Inspektorat
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4	Dinas Kesehatan
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
9	Dinas Perternakan dan Perkebunan
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Dinas Lingkungan Hidup
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
22	Badan Pendapatan Daerah
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : sekretariat Daerah

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara). Data primer di kumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan secara langsung ke responden, demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut. Responden diharapkan mengembalikan kembali kuesioner kepada peneliti dalam waktu yang telah ditentukan.

3.6. Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasional merupakan suatu tindakan yang membuat batasan-batasan yang akan digunakan dalam analisis. Adapun yang akan di analisis adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (*dependent variabel*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. pengamatan akan dapat mendeteksi atau menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta

perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan organisasi perangkat daerah. Dengan butir soal 1-4 skala linkert serta indikator sebagai berikut :

- a. Tersedianya informasi
- b. Laporan keuangan disediakan secara sistematis dan teratur.
- c. Laporan keuangan disampaikan tepat waktu.
- d. Laporan keuangan diserahkan paling lambat 2 bulan setelah anggaran berakhir.

2 Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (*dependent variable*) dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah:

a. Pemanfaatan Teknolgi Informasi (X1)

Menurut Sukirman (2013) dalam Puspaningsih (2016) Teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh staf bagian akuntansi/keuangan untuk mempercepat proses pengelolaan dan penyampaian laporan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya :

1. Pengolahan data, pengolahan informasi, system manajemen dan proses kerja secara elektronik
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Dengan butir soal 1-6 skala linkert serta indikator sebagai berikut :

3. Penggunaan computer untuk melaksanakan tugas
 4. Penggunaan *software* sesuai dengan yang dibutuhkan
 5. Proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi
 6. Adanya jaringan internet
 7. Pemanfaatan jaringan internet
- b. Pengawasan Keuangan Daerah (X2)

keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dengan butir soal 1-7 skala linkert serta indikator sebagai berikut :

1. Adanya pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspektorat daerah
2. Adanya pengawasan preventif
3. Adanya pengawasan represif
4. Terdapat pembinaan pengelolaan keuangan daerah
5. Terdapat evaluasi untuk perbaikan di masa datang
6. APBD telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.7. Teknik Analisis Data

Sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar data yang akan dimasukkan dalam model regresi telah memenuhi ketentuan dan syarat dalam regresi.

3.7.1 Statistik deskriptif

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan upaya pengukuran secara kuantitatif dari hasil pengumpulan data yang bersifat kualitatif dan untuk selanjutnya dilakukan analisis data pengukuran tersebut. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu data yang terkumpul kemudian dikategorikan menurut kriterianya masing-masing dan disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisa secara deskriptif berdasarkan teori-teori yang ada.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal. Analisis yang digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini yaitu dengan uji *kolmogrof-smiernov test* dengan ketentuan jika nilai signifikan *kolmogrof-smiernov test* pada variabel lebih besar dari nilai signifikasi ($\alpha > 0,05$) yang telah ditetapkan maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikasi *kolmogrof-smiernov test* pada variabel lebih kecil dari nilai signifikasi yang telah ditetapkan ($\alpha < 0,05$) maka tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variance residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedasitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot*.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui dan mengukur ada atau tidak pengaruh antara beberapa variabel independen, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap variabel dependen yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan sistem komputerisasi dengan memanfaatkan software statistik SPSS (*Statistic Product and Service Solution*).

Menurut Sugiyono, persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Ketepatan waktu pelaporan keuangan

a = Konstanta

b_1b_2 = Koefisien regresi

X_1 = Pemanfaatan teknologi informasi

X_2 = Pengawasan keuangan daerah

3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah persamaan statistik yang digunakan untuk mengetahui ketepatan hubungan satu variabel atau lebih terhadap variabel dependennya dalam satu persamaan regresi linier berganda. Koefisien determinasi

dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R^2). Dalam aplikasi SPSS angka yang digunakan untuk melihat koefisien determinasi yaitu angka R^2 adjusted, dikarenakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua variabel.

3.7.5. Uji Signifikan Secara Individu (Uji t)

Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas (independen) secara individual terhadap variabel terikat (dependen). Dengan tingkat signifikan 0,05 maka dapat ditentukan H_0 diterima atau H_0 ditolak.

Jika hasil penelitian menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika hasil penelitian menunjukkan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Riduwan:2013).

3.7.6 Uji Signifikan Secara Simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersamaan (pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah) terhadap variabel terikat yaitu Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Jika hasil penelitian menunjukkan $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika hasil penelitian menunjukkan $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Riduwan:2013).